

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
TINDAK PIDANA EKONOMI TERHADAP PELAKU YANG
MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI
PEMERINTAH TANPA IZIN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 126/PID.SUS/2020/PT GTO)**

Muh. Hasan Basri Yusuf *
Prof. Dr. H. M. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N **
Adil Akhyar, SH., L.LM., Ph.D **

ABSTRAK

Proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi wajib dilaksanakan berdasarkan dasar hukum, syarat-syarat dan prosedur yang berlaku, dan dilaksanakan secara berurutan mulai dari produsen, distributor, pengecer resmi yang ditunjuk oleh distributor, sampai ke petani atau kelompok tani pada wilayahnya. Permasalahan yang dibahas adalah Pengaturan hukum tentang pengawasan, pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi dalam putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PT GTO.

Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, alat pengumpulan data dalam penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dengan mengkaji Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PT GTO. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pasal 30 Ayat (3) Permendagri No 15/M.DAG/PER/4/2013 mengatur bahwa "Distributor dan Pengecer yang menjual Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain dan di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PT GTO menyatakan bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana ekonomi pupuk bersubsidi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mar.

Kata Kunci : Pupuk Bersubsidi, Tindak Pidana Ekonomi, Putusan Hakim

Utara * Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera

** Dosen Pembimbing

**ANALYSIS OF BASIC CONSIDERATIONS OF JUDGES IN IMPOSING
ECONOMIC CRIMINAL ACTIONS ON ACTORS WHO TRADER
SUBSIDIZED FERTILIZER GOVERNMENT WITHOUT LICENSE
(STUDY OF DECISION NUMBER 126/PID.SUS/2020/PT GTO)**

Muh. Hasan Basri Yusuf *
Prof. Dr. H. M. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N **
Adil Akhyar, SH., L.LM., Ph.D **

ABSTRACT

The process of procuring and distributing subsidized fertilizers must be carried out based on the legal basis, applicable requirements and procedures, and carried out sequentially starting from producers, distributors, authorized retailers appointed by the distributor, to farmers or farmer groups in their area. The issues discussed are legal arrangements regarding the supervision, procurement and distribution of subsidized fertilizers, criminal responsibility for perpetrators of economic crimes against subsidized fertilizers, judges' considerations in imposing sanctions on perpetrators of economic crimes on subsidized fertilizers in decision No. 126/Pid.Sus/2020/PT GTO .

The research method used is analytical descriptive, the type of research used in this research is normative juridical, the data collection tool in the research that will be used in this research uses Library Research by reviewing Decision Number 126/Pid.Sus/2020/PT GTO. Analysis of the data used is to use qualitative methods that produce descriptive-analytical data.

Based on the research results it is understood that Article 30 Paragraph (3) Permendagri No 15/M.DAG/PER/4/2013 stipulates that "Distributors and Retailers who sell Subsidized Fertilizers to traders and/or other parties and outside their designation and/or outside the area of responsibility is subject to sanctions in accordance with the provisions of the legislation. Decision Number 126/Pid.Sus/2020/PT GTO stated that the Defendant was proven to have committed the crime of subsidized fertilizer economy imposing a criminal sentence on the Defendant, imprisonment for 3 (three) months and upholding the decision of the Marisa District Court Number 69/Pid.Sus/2020 /PN Mar.

Keywords : *Subsidized Fertilizer, Economic Crime, Judge's Decision*

Utara * Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera

** Dosen Pembimbing